

Peran Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo

Mukharofah¹, M. Elfan Kaukab²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia
ova.chunsa23@gmail.com, elfan@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan BMD, penilaian BMD, penatausahaan BMD, pengawasan dan pengendalian BMD dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Metodologi - Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 pegawai di OPD Kabupaten Wonosobo dan didapat melalui teknik pengambilan purposive sampling.

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan BMD, penilaian BMD, pengawasan dan pengendalian BMD serta kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun penatausahaan BMD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Implikasi - Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah yaitu informasi terkait kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan kualitas laporan keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian).

Orisinalitas - Penelitian menggunakan variabel kompetensi SDM dengan alasan semakin kompeten SDM yang dimiliki oleh suatu instansi maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kata Kunci: *Kualitas laporan keuangan, perencanaan BMD, penilaian BMD, penatausahaan BMD, pengawasan dan pengendalian BMD, kompetensi SDM.*

Pendahuluan

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Putriasri Pujanira, 2017).

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *concepts statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dikatakan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang transparan dan

akuntabel, yang memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) fenomena yang terjadi dalam pemeriksaan laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I-2021, BPK memeriksa 541 (99%) LKPD tahun 2021 dari 542 pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD tahun 2020 mengungkapkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 486 LKPD atau 90 %, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 49 LKPD atau 9%, Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebanyak 4 LKPD atau 0,7%, dan Opini Tidak Wajar (TW) sebanyak 2 LKPD atau 0.3%.

Hasil pemeriksaan pada tahun 2020 dibandingkan dengan capaian tahun 2019, jumlah LKPD Tahun 2020 yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan. Pada LKPD Tahun 2019, sebanyak 485 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2020 sebanyak 486 dari 541 LKPD yang memperoleh opini WTP (bpk.go.id diakses 2022).

Tabel 1. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD BPK RI Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah

| No | Kabupaten/Kota | Tahun 2020 |
|----|-------------------|------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | WTP |
| 2 | Kab. Banyumas | WTP |
| 3 | Kab. Batang | WTP |
| 4 | Kab. Blora | WTP |
| 5 | Kab. Boyolali | WTP |
| 6 | Kab. Brebes | WTP |
| 7 | Kab. Cilacap | WTP |
| 8 | Kab. Demak | WTP |
| 9 | Kab. Grobogan | WTP |
| 10 | Kab. Jepara | WTP |
| 11 | Kab. Karanganyar | WTP |
| 12 | Kab. Kebumen | WTP |
| 13 | Kab. Kendal | WTP |
| 14 | Kab. Klaten | WTP |
| 15 | Kab. Kudus | WTP |
| 16 | Kab. Magelang | WTP |
| 17 | Kab. Pati | WTP |
| 18 | Kab. Pekalongan | WTP |
| 19 | Kab. Pemasang | WTP |
| 20 | Kab. Purbalingga | WTP |
| 21 | Kab. Purworejo | WTP |
| 22 | Kab. Rembang | WTP |
| 23 | Kab. Semarang | WTP |
| 24 | Kab. Sragen | WTP |
| 25 | Kab. Sukoharjo | WTP |
| 26 | Kab. Tegal | WTP |
| 27 | Kab. Temanggung | WTP |
| 28 | Kab. Wonogiri | WTP |
| 29 | Kab. Wonosobo | WTP DPP |

| | | |
|----|-----------------|-----|
| 30 | Kota Magelang | WTP |
| 31 | Kota Pekalongan | WTP |
| 32 | Kota Salatiga | WTP |
| 33 | Kota Semarang | WTP |
| 34 | Kota Surakarta | WTP |
| 35 | Kota Tegal | WTP |

Sumber : LHP LKPD (BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Wonosobo yang memiliki penilaian Laporan Keuangan Daerah (LKPD) untuk tahun 2020 WTP DPP. Permasalahan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wonosobo oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Adapun Temuan Hasil Pemeriksaan LKPD BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

| No | Tahun | Temuan |
|----|-------|--|
| 1 | 2017 | Pengelolaan Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2017 Belum Memadai |
| 2 | 2017 | Terdapat Aset Jalan dan Tanah Jalan yang Belum Dicatat dan Terdapat Ruas Jalan di Lingkungan Kelurahan yang Belum Ditetapkan Statusnya |
| 3 | 2017 | Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Belum Diserahkan oleh Pengembang |
| 4 | 2018 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo Belum Menyerahkan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Urusan Pendidikan Menengah Sebesar Rp9.796.735.322,00 Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 5 | 2018 | Aset Tanah dan Bangunan Pasar Induk (Pasar Atas) dan Pasar Kertek Wonosobo Hasil Kemitraan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga Belum Sepenuhnya dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Sebesar Rp422.400.000,00 |
| 6 | 2019 | Aset Tanah dan Kendaraan Dinas Belum Didukung Dengan Bukti Kepemilikan, Aset Tetap Belum Dicatat di KIB Secara Lengkap dan Terdapat Jalan Lingkungan dan Aset Lainnya yang Belum Ditetapkan |
| 7 | 2019 | Rincian Penerima Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat Tidak Ditetapkan dalam APBD, Terlambat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp 938.265.758,00 dan Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp4.963.258.420,00 |
| 8 | 2020 | Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum tertib |
| 9 | 2020 | Penyajian Saldo Persediaan tidak didukung Pencatatan dan Pelaporan Persediaan yang tertib serta Beban Persediaan belum menggambarkan nilai persediaan yang digunakan. |

Sumber : LHP LKPD (BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)

Pada Tabel 2 menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pengelolaan barang milik daerah tetap di Kabupaten Wonosobo walaupun sudah mendapatkan opini WTP.

Badan Pemeriksa Keuangan juga mengungkapkan 5.367 temuan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas LKPP tahun 2020 terdapat 1.699 temuan terkait kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan atau 31,65 %. Sebanyak 31,65% temuan adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak tepat waktu. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah (bpk.go.id diakses Februari 2022). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria andal (reliable) dan relevan, sedangkan dua unsur nilai informasi ini sangat penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Disamping itu akan terjadi kesulitan apabila akan diperbandingkan antar periode (Setiawati, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria karakteristik yang ditetapkan maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak sesuai maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakefisien dan ketidakefektifan (Tantriani, 2012).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Menurut Mokoginta, dkk (2017) laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang akan berguna bagi pemerintah daerah guna menyusun dan mengevaluasi kebijakan dalam mengelola sumber dana. Berdasarkan tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan memiliki kualitas.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kriteria dan unsur pembentuk kualitas laporan keuangan (Ida Ayu dan Ni Made, 2016)

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk Kualitas Laporan Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan

apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dipahami oleh penggunanya.

Untuk memperoleh opini WTP dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti- bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK. Oleh karenanya agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan terarah (Muhammad dan Indra, 2018).

Permasalahan yang muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah masalah pengelolaan aset. Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Pada kasus tertentu, ada daerah yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau tidak memberi pendapat (*disclaimer*) yang disebabkan ketidakmampuan mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara baik. Lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal pemerintah daerah, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola aset pemerintah daerah, terbatasnya sarana prasarana dan sistem pendukung pengelolaan aset pemerintah daerah. Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset, regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan seperti legalitas kepemilikan tanah dan masalah lainnya (Ferdianus, 2013)

Pengelolaan barang milik negara/daerah (dimana pengelolaan aset termasuk di dalamnya) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sendiri meliputi 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) pengadaan; 3) penggunaan; 4) pemanfaatan; 5) pengamanan dan pemeliharaan; 6) penilaian; 7) pemindahtanganan; 8) pemusnahan; 9) penghapusan; 10) penatausahaan; 11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bagi pemerintah daerah, peraturan lebih rinci terkait pengelolaan barang milik daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan BMD merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang (BPPK Kemenkeu, 2011). Perencanaan sebagai tahapan awal dan penting dalam

pengelolaan BMD merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik semakin baik perencanaan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Effendi, 2015). Selain perencanaan, faktor selanjutnya yaitu penilaian.

Penilaian BMD adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini atas nilai suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMD (PP No 27 Tahun 2014). Penilaian BMD yang baik akan menghasilkan penyajian nilai neraca atas aset pemerintah daerah akan memadai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. apabila dilakukan peningkatan terhadap penilaian aset/barang maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rudianto, 2012). Faktor selanjutnya yaitu penatausahaan.

Penatausahaan BMD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri No 17 Tahun 2007). Dengan penatausahaan BMD akan dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap BMD yang dikuasai pemerintah daerah. Menurut Anggareini (2015) menyatakan bahwa semakin baik penatausahaan aset/barang maka semakin baik kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor lainnya yaitu pengawasan.

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataanyang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan BMD secara efisien dan efektif maka diperlukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas aset/BMD, sehingga pengelolaan aset/ barang daerah akan semakin baik maka akan mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas (Effendi, 2015). Faktor terakhir yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yaitu kualitas aparatur daerah pengelola barang milik daerah.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang menangani sistem barang milik daerah mengerti dan memahami tentang sistem barang milik daerah tersebut. Inayah (2010) menunjukkan bahwa faktor kualitas staf yang menjadi pelaksana pengelola barang milik daerah akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Faktor sumber daya terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Wonosobo memiliki hubungan yang kuat, karena indikator yang menjadi tolak ukur sumber daya yaitu pembagian kewenangan berjalan baik, informasi cukup karena komunikasi berjalan efektif, serta fasilitas fisik dan *financial* yang memadai.

Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimiliki BMD semakin berkualitas maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Assyfa, 2014).

Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar. Jumlah dan potensi kekayaan/aset Negara yang begitu besar dirasakan masih belum dapat mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan/aset negara (Efrizal, 2016).

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan juga telah banyak dilakukan antara lain : 1) Fitriawati (2021), 2) Asep Suryana (2021), 3) Yulpi Poae, Ventje Liat dan Jessy Warongan (2018), 4) Sri Wahyuni, Isti Fadah, dan Diana Sulianti Tobing (2018), 5) Rusmasn (2017), 6) Ida Ayu Enny Kiranayanti dan ni Made Adi Erawati (2016), 7) Efrizal Syofyan Anshari (2016). Review penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Yulpi Poae, Ventje Liat dan Jessy Warongan (2018) yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini mengambil lokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas laporan keuangan namun masih terdapat permasalahan aset didalamnya. Salah satu permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah rekonsiliasi antara bagian keuangan, bagian administrasi barang milik daerah dan pengurus barang SKPD belum memadai. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, dapat dilihat bahwa Penatausahaan barang milik daerah ini akan berdampak pada penatausahaan keuangan daerah karena laporan barang milik daerah merupakan bahan untuk menyusun neraca daerah. Pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dan masih terdapat permasalahan aset tetap pada paragraph penjelasan tersebut. Selain itu penelitian ini juga menambahkan 1 (satu) variabel kompetensi SDM dengan alasan semakin kompeten SDM yang dimiliki oleh suatu instansi maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Menurut Winwin dan Mubarok (2017) kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut adalah perencanaan BMD, penilaian BMD, penatausahaan BMD, pengawasan dan pengendalian BMD dan kompetensi sumber daya manusia.

Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan BMD merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar

dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang (BPPK Kemenkeu, 2011). Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia sehingga perencanaan sebagai tahapan awal dan penting dalam pengelolaan BMD merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik (Effendi, 2015). Semakin baik perencanaan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulpi, Ventje dan Jessy (2018) membuktikan bahwa perencanaan BMD berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian Asep Suryana (2021) yang membuktikan bahwa perencanaan BMD berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik dan matang perencanaan BMD yang dilakukan maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) karena apabila kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dan aturan yang sudah ditetapkan maka apabila perencanaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan baik. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD)

Penilaian Barang Milik Daerah

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu (PP Nomor 28 tahun 2020). Opini nilai atas suatu objek penilaian BMD yang dilakukan akan menghasilkan suatu koreksi nilai barang terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan aset dengan tujuan menyajikan nilai wajar pada neraca keuangan akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan aset. Penilaian BMD yang baik akan menghasilkan penyajian nilai neraca atas aset pemerintah daerah akan memadai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Artinya apabila dilakukan peningkatan terhadap penilaian aset/barang maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulpi, Ventje dan Jessy (2018) dan Fitriawati (2021) yang membuktikan bahwa penilaian BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian BMD yang baik akan menghasilkan penyajian nilai neraca atas aset pemerintah daerah akan memadai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Artinya apabila dilakukan peningkatan terhadap penilaian aset/barang maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Penilaian BMD berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD).

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)

Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Pasal 1 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Sedangkan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan penatausahaan BMD akan dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap BMD yang dikuasai pemerintah daerah. Jika penatausahaan dilakukan dengan baik meliputi rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN dengan baik dan sesuai aturan maka akan menghasilkan sinkronisasi antara laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan BMD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penatausahaan aset/barang maka semakin baik kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusman (2017) dan Yulpi, Ventje dan Jessy (2018) dan Rusman (2017) membuktikan bahwa penatausahaan BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jika penatausahaan dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan maka akan terjadi sinkronisasi antara laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan BMD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penatausahaan aset/barang maka semakin baik kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Penatausahaan BMD berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD).

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya. Menurut Efrizal Syofyan Anshari (2016) pengawasan dan pengendalian merupakan suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, nilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan atau tugas, melakukan koreksi atas kesalahan membuat pekerjaan tetap terkontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pengawasan semakin baik maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik, karena hal-hal yang menimbulkan kesalahan akan semakin sedikit dengan adanya pengawasan selain itu untuk membangun manajemen yang baik pengawasan dan pengendalian merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi tetap berjalan dengan semestinya.

Hasil penelitian Yulpi, Ventje dan Jessy (2018) dan Anshari (2016) dan Efizal (2016) membuktikan bahwa pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan semakin baik maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik, karena hal-hal yang menimbulkan kesalahan akan semakin sedikit dengan adanya pengawasan selain itu untuk membangun manajemen

yang baik pengawasan dan pengendalian merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi tetap berjalan dengan semestinya. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Pengawasan dan Pengendalian BMD berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD).

Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

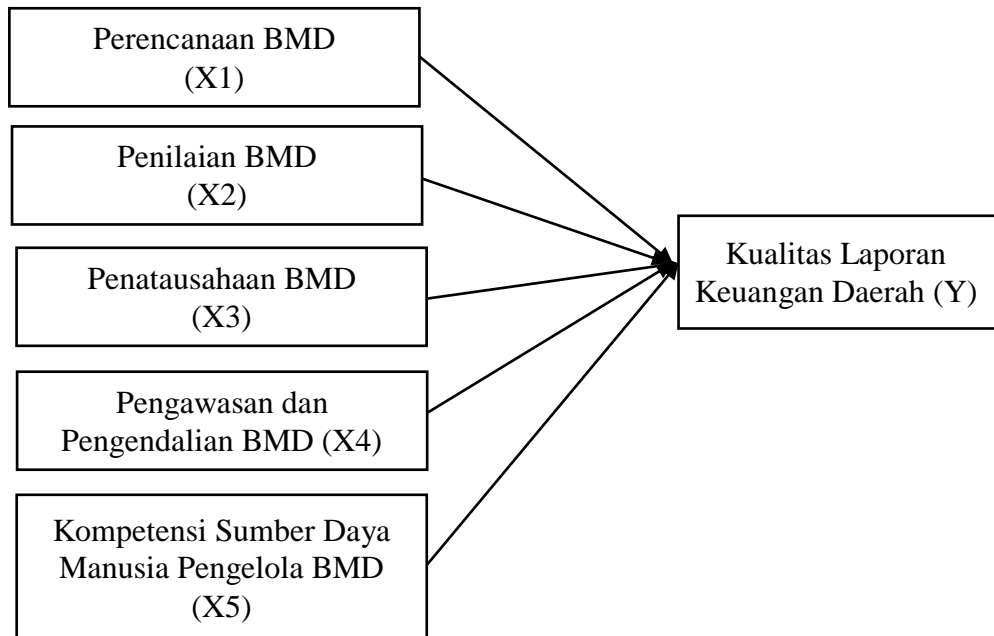
Menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawainegeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilakuyang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007). Sejalan dengan otonomi pemerintahan daerah tuntutan masyarakat kepada pemerintahan daerah semakin meningkat. Pemerintahan harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu tanggung jawab *good governance* pemerintah harus menyediakan informasi bagi penyedia dana dan pemakai lain. Guna memenuhi tanggung jawab ini dibutuhkan sumber daya manusia dalam penyusunannya. Sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Ida dan Ni Made, 2016). Selain itu jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif (Kadek, dkk, 2014).

Hasil penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia pengelola BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif, sehingga semakin kompeten sumber daya manusianya maka semakin baik kulaitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Kompetensi sumber daya manusia pengelola BMD berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan uraian sebelumnya, dibuat model penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi dalam penelitian ini adalah petugas atau pegawai yang di lingkungan OPD Kabupaten Wonosobo sejumlah 1.483 pegawai. Teknik penarikan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk sebagai petugas akuntansi pada bagian keuangan di lingkungan OPD Kabupaten Wonosobo. sejumlah 45 dari 15 OPD di Kabupaten Wonosobo.

Indikator yang diadopsi dari Yulpi, dkk. (2018) untuk mengukur kualitas laporan keuangan daerah adalah (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; (4) dapat dipahami. Indikator pengukuran dari variabel ini adalah: (1) perencanaan pengadaan; (2) perencanaan pemeliharaan; (3) perencanaan pemanfaatan; (4) perencanaan pemindahtanganan; (5) perencanaan penghapusan. Indikator pengukuran variabel ini adalah: (1) pelaksanaan; (2) penerapan; (3) hasil; (4) pemanfaatan. Indikator pengukuran dalam variabel ini adalah: 1) pembukuan; 2) inventarisasi; 3) pelaporan. Indikator pengukuran dalam variabel ini adalah: (1) inspeksi; (2) pemantauan; (3) uraian tugas; (4) audit. Sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia menggunakan kuesioner dari Ida Ayu dan Ni Made (2016) yang di modifikasi. Indikator pengukuran dalam variabel ini adalah: (1) pengetahuan; (2) keterampilan; (3) Sikap. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan 5 pertanyaan dengan poin skala likert. Pernyataan sikap responden diberikan skor pengukuran: 5 (SS= sangat setuju), skor 4 (S= setuju), skor 3 (N= netral), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS= sangat tidak setuju). Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan alat analisis analisis regresi berganda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan**Tabel 3.** Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | | Unstandardized | | Standardized | t | Sig. |
|-------|------------|----------------|------------|--------------|-------|------|
| | | Coefficients | | Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4.545 | 3.426 | | 1.327 | .192 |
| | TOTP | .417 | .198 | .405 | 2.106 | .042 |
| | TOTPN | .237 | .204 | .215 | 1.159 | .025 |
| | TOTPU | -.162 | .214 | -.161 | -.758 | .316 |
| | TOTPP | .173 | .207 | .155 | .837 | .041 |
| | TOTKS | .103 | .163 | .122 | .633 | .043 |

Pengaruh Perencanaan BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel uji hipotesis (H1) menunjukkan bahwa perencanaan BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara langsung sehingga H1 pada penelitian ini diterima. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan BMD merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang (BPPK Kemenkeu, 2011).

Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia sehingga perencanaan sebagai tahapan awal dan penting dalam pengelolaan BMD merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik (Effendi, 2015). Semakin baik perencanaan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui kisaran aktual tertinggi untuk variabel perencanaan BMD dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak. Berdasarkan uraian sebelumnya disimpulkan bahwa semakin baik dan matang perencanaan BMD yang dilakukan maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) karena apabila kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dan aturan yang sudah ditetapkan.

Pengaruh Penilaian BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel uji hipotesis (H2) menunjukkan bahwa penilaian BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara langsung sehingga H2 pada penelitian ini diterima. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu (PP Nomor 28 tahun 2020).

Opini nilai atas suatu objek penilaian BMD yang dilakukan akan menghasilkan suatu koreksi nilai barang terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan aset dengan tujuan menyajikan nilai wajar pada neraca keuangan akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan aset. Penilaian BMD yang baik akan menghasilkan penyajian nilai neraca atas aset pemerintah daerah akan memadai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Artinya apabila dilakukan peningkatan terhadap penilaian aset/barang maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui kisaran aktual tertinggi untuk variabel penilaian BMD dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Penilaian BMD yang baik akan menghasilkan penyajian nilai neraca atas aset pemerintah daerah akan memadai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Artinya apabila dilakukan peningkatan terhadap penilaian aset/barang maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Penatausahaan BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel uji hipotesis (H3) menunjukkan bahwa penatausahaan BMD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, (H3, ditolak). Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Pasal 1 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Sedangkan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan penatausahaan BMD akan dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap BMD yang dikuasai pemerintah daerah. Jika penatausahaan dilakukan dengan baik meliputi rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN dengan baik dan sesuai aturan maka akan menghasilkan sinkronisasi antara laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan BMD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penatausahaan aset/barang maka semakin baik kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian ini, penatausahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Proses penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh OPD belum bisa dilakukan penilaian secara akurat apakah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dan tidak tertib dengan standar yang sudah ditentukan. Masih ada diantara pegawai yang bertugas untuk melakukan pembukuan hanya melakukan proses penatusahaan untuk melunturkan kewajiban tanpa memperdulikan proses dan standar yang ada, sehingga penatusahaan tidak bisa menjadi dasar atau mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses penatusahaan yang dilakukan hanya untuk melunturkan kewajiban tanpa memperdulikan proses dan standar yang ada, sehingga penatusahaan tidak bisa menjadi dasar atau mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel uji hipotesis (H4) menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan dan pengendalian BMD terhadap kualitas laporan keuangan daerah, diterima. Komunikasi yang baik diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.

Menurut Efrizal Syofyan Anshari (2016) pengawasan dan pengendalian merupakan suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, nilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan atau tugas, melakukan koreksi atas kesalahan membuat pekerjaan tetap terkontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pengawasan semakin baik maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik, karena hal-hal yang menimbulkan kesalahan akan semakin sedikit dengan adanya pengawasan selain itu untuk membangun manajemen yang baik pengawasan dan pengendalian merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi tetap berjalan dengan semestinya. Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui kisaran aktual tertinggi untuk variabel pengawasan dan pengendalian BMD dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan semakin baik maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik, karena hal-hal yang menimbulkan kesalahan akan semakin sedikit dengan adanya pengawasan selain itu untuk membangun manajemen yang baik pengawasan dan pengendalian merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi tetap berjalan dengan semestinya.

Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel uji hipotesis (H5) menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah, diterima. Menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawainegeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilakuyang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007).

Sejalan dengan otonomi pemerintahan daerah tuntutan masyarakat kepada pemerintahan daerah semakin meningkat. Pemerintahan harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu tanggung jawab *good governance* pemerintah harus menyediakan informasi bagi penyedia dana dan pemakai lain. Guna memenuhi tanggung jawab ini dibutuhkan sumber daya manusia dalam penyusunannya. Sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Ida dan Ni Made, 2016). Selain itu jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif (Kadek, dkk, 2014). Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui kisaran aktual tertinggi untuk variabel kompetensi sumber daya manusia dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif, sehingga semakin kompeten sumber daya manusianya maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .625 ^a | .390 | .312 | 1.432 |

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini adalah 0,312 atau 31,2%. Sehingga dapat diketahui bahwa sebanyak 31,2% dalam penelitian ini dipengaruhi oleh variable independent yaitu perencanaan BMD, penilaian BMD, penatausahaan BMD, pengawasan dan pengendalian BMD, dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan 68,8% dipengaruhi oleh variable independent di luar penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik pengaruh perencanaan BMD, penilaian BMD, penatausahaan BMD, pengawasan dan pengendalian BMD, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah maka dapat disimpulkan perencanaan BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah artinya semakin baik dan matang perencanaan BMD yang dilakukan maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penilaian BMD berpengaruh artinya penilaian BMD yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Penatausahaan BMD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah artinya penatausahaan BMD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. proses penatusahaan yang dilakukan hanya untuk melunturkan kewajiban tanpa memperdulikan proses dan standar yang ada, sehingga penatusahaan tidak bisa menjadi dasar atau mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah artinya, apabila pengawasan dan pengendalian BMD sudah diterapkan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah artinya, apabila OPD memiliki sumber daya manusia yang kompeten, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat.

Sesuai dengan hasil uji yang sudah dilakukan serta pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, beberapa saran yang dapat direkomendasikan kepada Kepala OPD Kabupaten Wonosobo adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, sesuai dengan hasil penelitian ini Kepala OPD Kabupaten Wonosobo lebih menekankan dan meningkatkan pengelolaan barang milik daerah seperti perencanaan BMD dan penilaian BMD yang terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu Kepala OPD juga perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMD sehingga segala kegiatan yang dilakukan dapat terarah dan terukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Peningkatan kompetensi aparatur juga perlu dilakukan seperti pemberian pelatihan, workshop atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Anggareini, Ayang Putri Septiayu. 2015. *Pengaruh penatausahaan Barang Milik Negara terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor kementerian agama kota probolinggo*. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arif, Muhammad dan Arza, Indra,.M. 2018. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017*. Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi Vol.9 No 2 November 2018
- Asep Suryana. 2021. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jakarta Timur*. Kota Jakarta Timur.
- Astuti, Christina Dwi. 2007. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Volume 2, No. 1, Januari, Hal. 27-42*
- Efrizal Syofyan Anshari. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*. Padang
- Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari. 2014. *Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta*. ISBN: 978-602-70429-2-6.
- Ferdianus. 2013. *Analisis penatausahaan aset tetap untuk menghasilkan data yang dipercaya dalam laporan barang milik daerah (studi pada pemerintah provinsi maluku)*. Tesis. Universitas Gajah Mada.
- Fitriawati. 2021. *Pengaruh Penilaian, Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah berbasis Akrua di Badan pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara*. Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ida Ayu Enny Kiranayanti dan ni Made Adi Erawati. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Badung.

- Imbiri, Jefri., Rofingatun, Siti., & Pangayow, Bill. 2018. *Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan Dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Waropen)*. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Vol. 1 No. 2 Hal. 34-62*.
- Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Buleleng.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Novtania Mokoginta, Linda Lambey dan Winston Pontoh. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Vol. 12 No. 2 2017, hal 874-890.
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1,No.1.Hal: 2337-3806.
- Putriasri Pujanira. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta
- Rusman. 2017. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh*. Aceh
- Simamora, Rudianto. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan*. Tesis.
- Sri Wahyuni, Isti Fadah, dan Diana Sulianti Tobing. 2018. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kabupaten Bondowoso.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota Semarang)*. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Syarifudin, A. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)* Akhmad Syarifudin. *Jurnal Fokus Bisni*, 14(25), 26-44.
- Effendi, Yusuf. 2017. *Accounting principles prinsip-prinsip akuntansi berbasis SAK ETAP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yadiati, Winwin dan Abdullah Mubarak. 2017. *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Yulpi Poae, Ventje Liat dan Jessy Warongan. 2018. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Talaud.

www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71tahun2010tentangstandarakuntansi-pemerintahan/PP71.pdf. Diakses 5 februari 2022.

<http://keuda.kemendagri.go.id>. Diakses 5 februari 2022.

<http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/180/permedagri-no-04-tahun-2008>. Diakses 5 februari 2022.

www.menpan.go.id/rbkunwas/images/pedoman/pengawasan/PeraturanPemerintah-tahun-2008-060-08.pdf. Diakses 5 februari 2022.

www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010_tentang_standarakuntansi-pemerintahan/PP71.pdf. Diakses 5 februari 2022.

[http://itjen.kemenperin.go.id/itjen/peraturan/PP NO 102 2000](http://itjen.kemenperin.go.id/itjen/peraturan/PP_NO_102_2000). Diakses 5 februari 2022.

<http://mahsanafifiles.wordpress.com>. Diakses 5 februari 2022.

Lampiran Kuesioner Penelitian

1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

| Kualitas Laporan Keuangan Daerah | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|----|---|---|----|
| No | Pernyataan | STS | TS | N | S | SS |
| | Relevan | | | | | |
| 1 | Laporan keuangan yang disusun oleh instansi harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah | | | | | |
| 2 | Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan | | | | | |
| | Andal | | | | | |
| 3 | Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi harus menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan | | | | | |
| | Dapat dibandingkan | | | | | |
| 4 | Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya | | | | | |
| | Dapat dipahami | | | | | |
| 5 | Informasi laporan keuangan yang dihasilkan harus disajikan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna | | | | | |

2. Perencanaan Barang Milik Daerah (X1)

| Perencanaan BMD | | | | | | |
|-----------------|--|-----|----|---|---|----|
| No | Pernyataan | STS | TS | N | S | SS |
| | Perencanaan Pengadaan | | | | | |
| 1 | Perencanaan pengadaan dilakukan secara transparan dan terbuka, dan diketahui atasan | | | | | |
| | Perencanaan Pemeliharaan | | | | | |
| 2 | Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah dijadwalkan dengan baik | | | | | |
| | Perencanaan Pemanfaatan | | | | | |
| 3 | Barang Milik Daerah harus digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi yang mengadakan | | | | | |
| | Perencanaan Pemindahtanganan | | | | | |
| 4 | Pengalih kepemilikan BMD dilakukan dengan prosedur yang berlaku | | | | | |
| | Perencanaan Penghapusan | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 5 | Penghapusan BMD bisa dilakukan apabila BMD sudah tidak memiliki daya guna | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|

3. Penilaian BMD (X2)

| Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini Penilaian BMD | | | | | | |
|--|--|-----|----|---|---|----|
| No | Pernyataan | STS | TS | N | S | SS |
| | Pelaksanaan | | | | | |
| 1 | Kegiatan penilaian BMD harus dilaksanakan | | | | | |
| | Penerapan | | | | | |
| 2 | Penilaian menerapkan dasar hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008 | | | | | |
| | Hasil | | | | | |
| 3 | Hasil penilaian BMD harus dituangkan dalam laporan penilaian BMD | | | | | |
| 4 | Nilai yang disajikan dalam laporan hasil penilaian mencerminkan nilai BMD secara wajar | | | | | |
| | Pemanfaatan | | | | | |
| 5 | Hasil penilaian dijadikan dasar untuk pengadaan BMD selanjutnya | | | | | |

4. Penatausahaan BMD (X3)

| Penatausahaan BMD | | | | | | |
|-------------------|--|-----|----|---|---|----|
| No | Pernyataan | STS | TS | N | S | SS |
| | Pembukuan | | | | | |
| 1 | Pencatatan asset BMD telah sesuai dengan kodefikasi barang | | | | | |
| 2 | Pembukuan dapat dilakukan dengan menyajikan history barang sejak diperoleh hingga dihapuskan | | | | | |
| | Inventarisasi | | | | | |
| 3 | Inventarisasi BMD penting dilakukan untuk mencatat setiap aset | | | | | |
| 4 | Inventarisasi BMD secara periodik diperlukan untuk mengetahui keberadaan dan kondisi aset | | | | | |
| | Pelaporan | | | | | |
| 5 | Laporan BMD digunakan sebagai bahan untuk Menyusun laporan keuangan | | | | | |

5. Pengawasan dan Pengendalian BMD (X4)

| Pengawasan dan Pengendalian BMD | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|----|---|---|----|
| No | Pernyataan | STS | TS | N | S | SS |
| | Inspeksi | | | | | |
| 1 | Pemimpin harus melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | dan barang | | | | | |
| 2 | Pemimpin secara terus menerus harus melakukan penilaian terhadap kualitas | | | | | |
| | Pemantauan | | | | | |
| 3 | Pemimpin wajib mengetahui dan melakukan tindakan tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur dan atura perilaku | | | | | |
| | Uraian Tugas | | | | | |
| 4 | Pegawai dan atasan harus memahami tujuan dari kegiatan pengendalian | | | | | |
| | Pelaporan | | | | | |
| 5 | Laporan harus disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan korektif secara tepat | | | | | |

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X5)

| Kompetensi Sumber Daya Manusia | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|----|---|---|----|
| No | Pernyataan | STS | TS | N | S | SS |
| | Pengetahuan | | | | | |
| 1 | Pegawai harus memiliki pemahaman teknis pekerjaan yang baik | | | | | |
| 2 | Pegawai harus memahami peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang baik | | | | | |
| | Keterampilan | | | | | |
| 3 | Pegawai harus mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan baik | | | | | |
| 4 | Pegawai mampu Menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan neraca dengan baik | | | | | |
| | Sikap | | | | | |
| 5 | Pegawai harus selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai pegawai | | | | | |